

# Peran Dinas Koprasi Dan Umkm Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Rapat Tahunan Koprasi

<sup>1)</sup>Masri Yanti Sahputr, <sup>2)</sup>Husrina Huwaida, <sup>3)</sup>Wahyu Saputri, <sup>4)</sup>Rahmad Hidayat

1,2,3,4) Admininstrasi Publik, Fakultas ilmu sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. Kh Ahmad Dahlan No.1 1, Mataram, Indonesia

Email Corresponding: sahputri676@gmail.com

Informasi Artikel	ABSTRAK
Manajemen Koperasi UKM RAT Partisipasi Anggota	Dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota dalam rapat umum tahunan koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Koperasi dan UMKM menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masalah: Anggota koperasi mungkin tidak memahami pentingnya rapat umum tahunan atau mungkin tidak menyadari manfaatnya yang tidak mereka sadari, dengan adanya Solusi: Kementerian Koperasi dan UMKM dapat melakukan kampanye penyadaran mengenai peran dan manfaat rapat umum tahunan bagi anggota dan koperasi secara keseluruhan. Pelatihan dan penjangkauan rutin juga dapat membantu meningkatkan pemahaman. Kegiatan Ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam meningkatkan keanggotaan Rapat Umum Tahunan Koperasi. Partisipasi mitra dalam pertemuan majelis umum sangat penting untuk memastikan bahwa koperasi akuntabel, transparan dan mampu mengambil keputusan yang baik. Dengan menggunakan studi kasus dan metode kualitatif, pengabdian ini melakukan wawancara mendalam terhadap pimpinan koperasi, anggota koperasi, dan perwakilan koperasi serta dinas usaha kecil dan menengah Nusa Tenggara Barat. Observasi dan analisis dokumen adalah metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan data. Temuan menunjukkan bahwa NTB terlibat dalam meningkatkan partisipasi anggota melalui berbagai program dan kegiatan, seperti meningkatkan kesadaran akan pentingnya RAT, memberikan pelatihan pengelolaan koperasi, dan memberikan dukungan kepada anggota aktif. Namun pengabdian ini juga mengungkap banyak hambatan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sumber daya, kurangnya informasi anggota, dan kendala struktural. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan strategi komunikasi, meningkatkan kerjasama antar departemen dan koperasi, dan meningkatkan teknologi informasi untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada anggota.
Management Cooperation SME RAT Member Participation	<b>ABSTRACT</b> This research aims to determine the role of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (UKM) of West Nusa Tenggara (NTB) Province in increasing membership of the Cooperative Annual General Meeting (RAT). Participation of partners in general assembly meetings is very important to ensure that cooperatives are accountable, transparent and capable. make good decisions. Using case studies and qualitative methods, this research conducted in-depth interviews with cooperative leaders, cooperative members, and representatives of cooperatives as well as the West Nusa Tenggara small and medium enterprise department. Observation and document analysis are other methods used to collect data. Findings show that NTB is involved in increasing member participation through various programs and activities, such as increasing awareness of the importance of RAT, providing cooperative management training, and providing support to active members. However, this research also revealed many obstacles faced, including limited resources, lack of member information, and structural obstacles. Recommendations are given to improve communication strategies, increase cooperation between departments and cooperatives, and improve information technology to provide better support to members.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## I. PENDAHULUAN

Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada mitranya dan koperasi secara keseluruhan. Beberapa masalah paling umum yang kami temui yaitu, yang

pertama : Kurangnya akses permodalan: Banyak koperasi di NTB yang kesulitan memperoleh modal atau pembiayaan yang cukup untuk pengembangan usaha. Yang kedua Terbatasnya Pelatihan dan Pendidikan: Mitra koperasi seringkali kurang memiliki pelatihan dan pendidikan dalam hal manajemen koperasi, praktik bisnis, dan pemasaran yang efektif. Yang ketiga Pemasaran dan Akses Pasar: Koperasi seringkali menghadapi tantangan dalam memasarkan produknya dan mengakses pasar yang lebih besar. Keterbatasan jaringan pemasaran dan intelijen pasar dapat menghambat pertumbuhan. Keterbatasan infrastruktur: Beberapa permasalahan yang dapat menjadi kendala bagi perkembangan usaha koperasi, antara lain infrastruktur yang kurang memadai: akses terhadap sarana transportasi dan penyimpanan. Manajemen: Banyak koperasi yang mempunyai permasalahan terkait manajemen, seperti pengelolaan keuangan dan akuntansi yang baik. Peraturan dan Kebijakan: Peraturan dan kebijakan yang tidak jelas atau sering berubah dapat mempengaruhi operasional koperasi dan mitranya. Batasan Teknis: Kurangnya akses atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern dapat membatasi efisiensi dan efektivitas kolaborasi. Kepemimpinan dan Komitmen: Kurangnya kepemimpinan yang kuat atau komitmen yang tidak konsisten dari anggota koperasi dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan suatu koperasi. Kesehatan dan kesejahteraan anggota: Koperasi di NTB juga mungkin menghadapi tantangan terkait kesehatan dan kesejahteraan anggotanya, yang dapat berdampak pada produktivitas dan keberlanjutan koperasi yang ada. Bantuan dan Dukungan Pemerintah: Bantuan pemerintah tersedia, namun bantuan yang diberikan seringkali tidak memadai atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik koperasi. Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Kerja Sama NTB harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk mengembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Menurut Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 mendefinisikan koperasi sebagai organisasi usaha yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip -prinsip koperasi dan bertindak sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh gagasan gotong royong untuk mencapai masyarakat yang maju, adil, dan makmur. berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 koperasi berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat luas serta mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. (Wira & Gustati, 2016).

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Menurut (Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, 2022) menyebutkan bahwa, Keberhasilan suatu koperasi sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif para anggotanya dalam setiap kegiatan khususnya dalam rapat tahunan. Rapat kerja sama tahunan merupakan momen krusial bagi anggota untuk menilai kinerja, mengambil keputusan strategis, dan merencanakan kerja ke depan. Namun, partisipasi anggota dalam rapat tahunan seringkali rendah sehingga dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja sama.

Partisipasi adalah fasilitas utama untuk memacu kegiatan dan mengatur ikatan pemersatu di sebuah koperasi. Dalam hal ini, partisipasi anggota memberi sangat besar pengaruhnya bagi kemajuan sebuah koperasi, (Anasrulloh et al., 2021). Partisipasi anggota adalah kesediaan anggota untuk memikul dan memenuhi kewajiban keanggotaannya secara bertanggung jawab. Apabila sebagian anggota telah memenuhi hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab maka dapat dikatakan partisipasi anggota dalam koperasi sudah baik. Namun apabila anggota koperasi yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut hanya sedikit, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan dapat dikatakan buruk atau rendah. Partisipasi anggota koperasi dapat diwujudkan dengan cara membayarkan simpanan pokok dan wajib secara teratur, membantu modal koperasi dengan tabungan sukarela, memanfaatkan fasilitas koperasi melalui simpan pinjam, dan melakukan transaksi di dalam koperasi. Berkembangnya usaha koperasi merupakan salah satu upaya agar usaha tersebut semakin berkembang dan maju. Begitu pula dengan usaha koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan anggotanya dan mengembangkan usahanya. Struktur organisasi dan kepengurusan yang melibatkan partisipasi setiap anggota serta pembagian keuntungan yang adil menjadikan koperasi sebagai harapan bagi perkembangan perekonomian Indonesia.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan koperasi. Departemen ini memiliki berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi anggota koperasi. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan Dinas Koperasi dan UMKM berupaya meningkatkan pemahaman anggota koperasi akan pentingnya keterlibatan aktif dalam pertemuan tahunan. Selain itu, departemen ini juga memberikan bantuan teknis dan material untuk mendukung pertemuan tahunan yang lebih efektif dan efisien. Setiap permasalahan yang dihadapi suatu koperasi akan diselesaikan melalui musyawarah bersama antara pengurus dan anggota koperasi. Pembahasan mengenai keberhasilan dan kemunduran, serta situasi kepengurusan koperasi, biasanya dibahas dalam Rapat Koperasi Tahunan yang diadakan rutin setiap tahun. RAT merupakan salah satu alat organisasi dalam koperasi yang memegang peranan paling penting dalam suatu koperasi. Tujuan Rapat Umum koperasi adalah membahas dan mengkaji akuntabilitas pengurus koperasi selama suatu periode, dimana masing - masing Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peranan penting dalam mendukung pengembangan koperasi. (Dwipa et al., 2022)

Kantor ini memiliki berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi anggota koperasi. Melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan, Dinas Koperasi dan UKM berupaya meningkatkan pemahaman anggota koperasi akan pentingnya partisipasi aktif dalam pertemuan tahunan. Selain itu, departemen ini juga memberikan bantuan teknis dan material untuk menunjang rapat tahunan di masing-masing bidang, termasuk Ketua dan pengawas mulai dari program kerja yang sedang berjalan, kendala yang dihadapi, dana yang digunakan, keuntungan atau kerugian yang timbul, dan hal-hal terkait perkembangan koprasa.

Sinergi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan koperasi diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi anggota dalam pertemuan tahunan Dengan partisipasi yang lebih tinggi. koperasi dapat menjalankan fungsi demokrasinya dengan lebih efektif dan mengambil keputusan yang lebih representatif dan berkualitas, Oleh karena itu, pengabdian mengenai peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam pertemuan tahunan koperasi menjadi penting untuk memahami efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan serta dampak positifnya terhadap koperasi.

## II. METODE

Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari responden melalui Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mempelajari secara langsung kondisi objek meliputi keadaan fisik, kelengkapan sarana dan prasarana. Wawancara dilakukan pada stakeholder seperti kabid bidang koperasi/ para pegawai pada bidang koperasi selaku Pembina dalam bidang koperasi di Dinas koperasi dan umkm BTN untuk mengetahui apa saja yang telah diupayakan oleh dinas koperasi dan umkm NTB dalam meningkatkan partisipasi anggota pada rapat tahunan koperasi (Rat). Pengabdian ini menggunakan analisa data lapangan, yaitu dengan cara magang di di dinas koperasi dan umkm NTB mulai dari awal Januari sampai Dengan Pertengahan Marat sehingga dapat Mengetahui permasalahan dan upaya yang di lakukan oleh dinas koperasi dan umkm NTB.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung, yang kemudian dijelaskan atau dideskripsikan kembali dengan gaya bahasa peneliti sendiri. (Dwipa et al., 2022)

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota Tahunan (RAT) adalah pertemuan rutin yang wajib diadakan oleh koperasi setiap tahun. Ini adalah forum tertinggi dalam struktur organisasi koperasi di mana anggota koperasi berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai berbagai aspek operasional dan kebijakan koperasi.

Tujuan dan Fungsi RAT adalah Evaluasi dan Laporan Kinerja yang dimana RAT merupakan wadah pengurus koperasi untuk melaporkan kepada anggota mengenai kinerja koperasi selama setahun terakhir. Laporan tersebut mencakup aspek keuangan, operasional dan politik. Manajemen juga melaporkan hasil audit dan pertanggungjawaban keuangan. Pengambilan Keputusan dalam Anggota koperasi menggunakan

RAT untuk mengambil keputusan penting tentang arah dan kebijakan koperasi di masa depan. Keputusan ini mungkin mencakup perubahan struktur organisasi, rencana investasi, atau kebijakan baru. Pemilihan pengurus, RAT memperbolehkan anggotamemilih atau mengganti pengurus koperasi. Ini adalah proses demokratis yang menjamin bahwa pengurus koperasi tetap bertanggung jawab kepada anggotanya. Pemilihan ini sering kali menghasilkan penunjukan administrator atau auditor untuk tahun berikutnya. Pembagian sisa hasil usaha (SHU), dewan juga menentukan pembagian SHU, yaitu keuntungan yang diperoleh koperasi setelah melunasi seluruh biaya dan kewajiban. SHU dibagikan kepada anggota berdasarkan keikutsertaannya dalam koperasi.

Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar (AD/ART), Anggota dapat menggunakan RAT untuk membahas dan menyetujui perubahan AD/ART yang menjadi landasan hukum dan operasional koperasi Masu. Pentingnya RAT bagi koperasi dan UMKM: Transparansi dan akuntabilitas, RAT memastikan bahwa pengelola koperasi bertanggung jawab kepada anggotanya.

Hal ini membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bersama. Partisipasi Anggota, RAT mendorong partisipasi aktif anggota dalam proses pengambilan keputusan sehingga semua anggota merasa menjadi pemangku kepentingan dan dapat berkontribusi terhadap keberhasilan koperasi. Integrasi dan Pengembangan, RAT merupakan kesempatan bagi anggota untuk berkumpul, berdiskusi dan menyusun strategi bersama untuk pengembangan koperasi dan UMKM. Adaptasi kebijakan Melalui RAT, koperasi dapat menyesuaikan kebijakan mereka terhadap perubahan lingkungan ekonomi, sosial dan peraturan, sehingga tetap relevan dan kompetitif. Proses Pelaksanaan RAT, Persiapan Pengurus koperasi harus menyiapkan laporan tahunan dan bahan rapat lainnya sebelum RAT dilaksanakan Tanggal dan agenda RAT akan diberitahukan terlebih dahulu kepada 4.444 anggota koperasi.

Implementasi Pada Hari RAT, laporan tahunan dibacakan dan didiskusikan, dan anggota diberi kesempatan untuk bertanya dan memberikan komentar. Keputusan diambil melalui pemungutan suara atau musyawarah untuk mufakat. Tindak lanjut Keputusan yang diambil dalam DEWAN dilaksanakan oleh pengurus koperasi. Hasil RAT juga harus dilaporkan kepada otoritas terkait seperti koperasi dan dinas UMKM. Relevansi RAT dengan UMKM di NTB, RAT berfungsi sebagai mekanisme kunci untuk menjaga koperasi UMKM di NTB tetap sehat dan efisien. Hal ini akan membantu memastikan bahwa UMKM menerima dukungan yang memadai dari koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, Kerangka Hukum dan Peraturan: Pelaksanaan RAT diatur dalam UU No. Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian di Indonesia mewajibkan koperasi menyelenggarakan RAT sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Dengan penerapan RAT yang tepat, koperasi NTB dapat semakin berkembang, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya, dan mendukung pertumbuhan UMKM di daerah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan tugas serta fungsi Koperasi Usaha Kecil Menengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016. Tata kerja mengenai letak, susunan, organisasi, tugas dan tugasnya diatur oleh Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan perintah Gubernur, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil yang berada di wilayah negara dan melaksanakan tugas penunjang yang diberikan kepada daerah Negara.



Gambar 1: RAT kab. Lombok utara

Pada gambar diatas membahas tentang RAT di kabupaten Lombok utara yang dimana para anggota-anggota koperasi mengumpulkan semua data data yang sudah terimput di dinas koprasa dan umkm ntb. UKM Dinas Koperasi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugasnya dibekali untuk melaksanakan kebijakan strategis bagi koperasi, usaha kecil dan menengah (a) Implementasi kebijakan strategis bagi koperasi kecil dan menengah, (b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada tingkat koperasi, usaha kecil dan menengah, (c) Penyelenggaraan manajemen pelayanan pada tingkat koperasi mikro, kecil dan kecil, (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan bidang usahanya. spesialisasi. (R. Hidayat et al., 2023) Hal tersebut di atas sangat mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi, khususnya Misi ke-5 Yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Dalam mewujudkan pencapaian misi ke-5 tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB akan mengimplementasikannya melalui program strategis dan unggulan antara lain Koperasi Berprestasi, UKM Bersaing beserta program strategis rutin lainnya.

Hal tersebut di atas sangat mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi, khususnya Misi ke-5 Yaitu NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi. Dalam mewujudkan pencapaian misi ke-5 tersebut di atas, Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB akan mengimplementasikannya melalui program strategis dan unggulan antara lain Koperasi Berprestasi, UKM Bersaing beserta program strategis rutin lainnya.

Tabel 1: Data koperasi aktif dan tidak aktif

## REKAPITULASI DATA KOPRASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2023 (SAMPAI 12 JULI 2023)

NO	KABUPATEN/KOTA	KOPERASI (UNIT)		
		AKTIF	TDK AKTIF	JUMLAH
1.	Kab.lombok barat	198	354	552
2.	Kab.lombok tengah	319	13	322
3.	Kab.lombok timur	305	304	609
4.	Kab.sumbawa	265	184	449

5.	Kab.dompuk	223	174	397
6.	Kab. Bima	218	112	330
7.	Kab. Sumbawa barat	493	36	529
8.	Kab.lombok utara	139	40	179
9.	Kota mataram	159	435	594
10.	Kota bima	115	66	181
11.	Binaan provinsi	359	55	414
12.	Binaan nasional	65	0	65
	Jumlah	2.858	1.773	4.631

Pada tabel di atas akan menemukan informasi tentang koperasi yang aktif dan tidak aktif. Demikian gambaran informasi koperasi tingkat provinsi tahun anggaran 2023 yang bersumber dari dinas koperasi dan UMKM NTB. Pada tabel di atas, koperasi tersebar di kabupaten-kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Hanya 2.858 dari 4.631 koperasi yang aktif, dan separuh dari jumlah koperasi tersebut merupakan koperasi tidak aktif, tercermin dari jumlah koperasi per tahun yang berjumlah koperasi.

Rapat Tahunan Koperasi (RAT) merupakan momen penting dalam siklus kehidupan koperasi, RAT berfungsi sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan strategis, evaluasi kinerja, serta perencanaan kegiatan koperasi di masa mendatang. Tingkat partisipasi anggota dalam RAT mencerminkan tingkat keterlibatan dan kepedulian anggota terhadap koperasi mereka. Dalam konteks ini, peran Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat vital untuk memastikan partisipasi aktif dari para anggota koperasi.

#### **Peran Dinas Koperasi dan UMKM NTB Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Rapat Tahunan Koperasi**

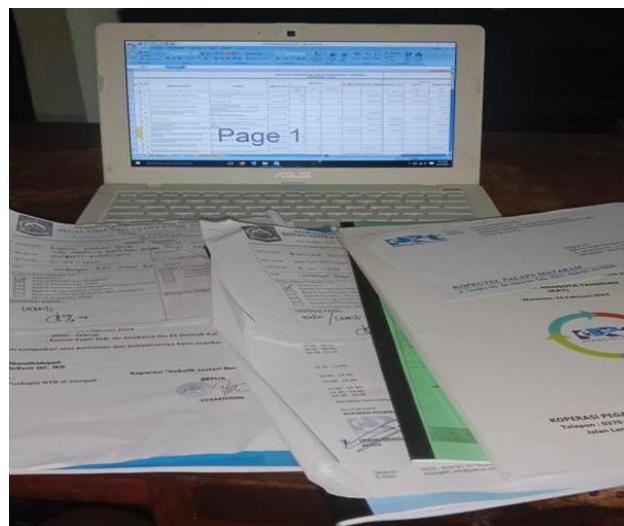
Dinas Koperasi dan UMKM NTB memiliki beberapa peran strategis dalam meningkatkan partisipasi anggota koperasi pada RAT, di antaranya: Sosialisasi dan Edukasi yang dimana Dinas Koperasi dan UMKM NTB aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota koperasi mengenai pentingnya RAT. Edukasi ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota, proses pengambilan keputusan, serta manfaat partisipasi aktif dalam RAT. Dengan pemahaman yang baik, anggota diharapkan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam RAT.

Pelatihan dan peningkatan kapasitas Dinas Koperasi dan UMKM NTB membantu anggota koperasi mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ini. Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup tugas-tugas manajemen, keuangan dan administrasi yang dapat memperkuat kapasitas anggota dalam pelaporan pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengelola koperasi atau pegawai pengelola dalam mengelola proyek koperasi, sehingga memahami prinsip dasar pengelolaan yang baik dan mengembangkan koperasi, meningkatkan pengetahuan pengelola koperasi, auditor dan menambah jumlah pengelola. Meningkatkan kemampuan pengelola, pengawas, dan pengelola dalam mengerjakan RAT secara efektif agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, meningkatkan kemampuan pengelola, pengawas, dan pengelola dalam merencanakan strategi kerja sama dan menyusun RAPBK. Dan mengembangkan kapasitas pengelola, auditor dan pengelola dalam metode/teknik penyusunan laporan manajemen/ kepada auditor secara efisien dan efektif untuk menjamin RAT tepat waktu. Tenaga pengajarnya antara lain Widya Iswara dari Balai Diklat Koperasi Daerah NTB di Kabupaten NTB, Direktur Dinas Pembinaan Koperasi Koperasi Kabupaten NTB di Kabupaten UKM, Dinas Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi UKM Kabupaten NTB, UKM Dinas Koperasi Provinsi NTB, Pemimpin Cabang FPSP Bank Indonesia. Yang akan memberikan pelatihan terdiri dari pengelola pelayanan koperasi daerah NTB.



Gambar 2 : Meeting terkait fasilitas pelaksanaan RAT

Pelayanan koperasi sendiri meliputi Fasilitasi dan Dukungan Teknis dengan NTB dan pelayanan koperasi UMKM yang memberikan berbagai bantuan teknis untuk memperlancar pelaksanaan RAT. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan penyusunan laporan keuangan, pemberian materi pelatihan, dan bantuan pelaksanaan RAT. Dengan dukungan teknis yang memadai, koperasi dapat menyelenggarakan RAT secara efisien dan efektif sehingga mendorong anggotanya untuk berpartisipasi. (R. H. Hidayat et al., 2020) UKM Dinas Daerah NTB memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada koperasi yang belum menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam rangka meningkatkan pengetahuan koperasi mengenai pelaksanaan RAT dan meningkatkan kapasitas kepengurusan koperasi yang bergerak di sektor riil, syariah, simpanan, dan pinjaman. Peraturan Teknis tersebut antara lain meliputi kebijakan koperasi tentang tanggung jawab koperasi dalam pelaksanaan RAT, model akuntansi koperasi pada tingkat riil dan kredit simpan pinjam Syariah, penyusunan laporan RAT dan RAPBK serta praktik menyiapkan laporan keuangan sederhana. Proses presentasi dilakukan melalui demonstrasi, diskusi dan praktik. Oleh karena itu, peralatan dan dukungan teknis yang diberikan UMKM Provinsi NTB melalui Bimtek dapat membantu koperasi dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat melakukan RAT.



Gambar 3 : Buku RAT

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat risalah rapat tahunan anggota koperasi; Dalam dokumen ini, pengurus koperasi harus menyampaikan laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya angka-angka untuk tahun tersebut. Artikel terakhir Anda. Menghitung hasil kegiatan tahun baru dan tahun-tahun sebelumnya, menjelaskan dengan dokumen bagaimana mencapai struktur koperasi dan hasil operasi, serta membuat rencana kerja koperasi tahun depan. Monitoring dan evaluasi pelayanan koperasi NTB dan UMKM yang melaksanakan RAT. Mereka memastikan bahwa RAT dilakukan sesuai dengan peraturan dan kontrol yang berlaku di tingkat anggota. Hasil penilaian ini akan digunakan untuk meningkatkan dan memperluas operasional bisnis di masa depan. Persiapan dan

pemberitahuan RAT, pemeriksa administrasi, yang memastikan bahwa Dinas Koperasi mengirimkan surat keterangan praktek koperasi kepada seluruh anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. ini menyangkut pengecekan apakah laporan telah dibuat dalam waktu yang ditentukan. Mereka juga menyiapkan dokumen yang dibahas dalam RAT, seperti laporan keuangan, rencana kerja, dan agenda rapat.

Tabel 2 : Data koperasi binaan provinsi yang telah rapat anggota tahunan (RAT)

NO	KODE	NAMA KOPERASI	ALAMAT	TANGGAL RAT	ANGGARAN		TUNGGAKAN		PENGELUARAN		PENGALAMAN		SISA	
					ADUAN	DEKLARASI	10000000	25%	10000000	10000000	10000000	10000000		
1	01	Koperasi Konservasi Masyarakat	Jl. Pengantap Bantul Samarinda Selatan Kalimantan Timur	1 Januari 2024	100%				300.000.000	291.200.420	171.028.980	100.000.000	69.400.000	
2	02	Koperasi Sistem Elektronik	Jl. Entang No. 21	11 Januari 2024	100%	85%	85%		1.344.953.200	48.556.375	1.732.095.000	257.113.000	204.785.000	
3	03	KOPERASI SIKUNEN PUSKESMAS	Jl. TPI Negeri Negeri	13 Januari 2024							777.16.000	34.400.000	742.46.000	
4	04	KOPERASI SIKUNEN SURABAYA SPK SEJAHTERA MULIA MINTA	Jl. Prawiranegara No. 10 Samarinda Samarinda Kalimantan Timur	14 Januari 2024	87%				126.40.000		63.000.000	4.970.000	42.460.000	
5	05	KUD Langkawi	Desa Jatinegoro, Kec. Langkawi Kecamatan Tenggarong	20 Januari 2024	85%	42%	65%	2.300.59.050	1.814.20.550	2.613.354	7.521.027.910	1.812.36.000	5.149.857.500	
6	06	KOPERASI USA SEJAGOBATI INDONESIA SEJAHTERA MINTA	Jl. Prawiranegara No. 10 Samarinda Samarinda Kalimantan Timur	24 Januari 2024	80%				50.000.000	50.000.000	15.000.000.000	147.900.000	550.000.000	
7	07	KOPERASI SIKUNEN BUDAYA DAN KONSEP	Jl. TPI Negeri Negeri	10 Januari 2024	8%			875.10.000	907.30.000	3.007.495	1.020.000.000	170.40.000	130.810.140	4.435.000
8	08	KOPERASI SIKUNEN KUDAHAN MINTA	Jl. Langkawi Desa Jatinegoro	01 Januari 2024	10%			1.754.30.000		1.025.00.000	205.05.000	42.242.000	24.135.000	#ASDEI
9	09	KOPERASI SIKUNEN KUDAHAN MINTA	Jl. Langkawi Desa Jatinegoro	15 Januari 2024	10%									-
10	10	KOPERASI SIKUNEN KUDAHAN MINTA	Jl. Sambutan Desa Jatinegoro	19 Januari 2024	21%	10%	11%	9.470.000			6.014.000		716.000.000	#ASDEI
11	01	KOPERASI SIKUNEN MINTA DAI	Jl. Prawiranegara Desa Jatinegoro Kalimantan Timur	27 Januari 2024	1.000.000			2.765.625.000	4.265.30.000	8.419.372.000	7.039.627.000	10.954.200.000	8.932.402.000	#ASDEI
12	02	KOPERASI SIKUNEN MINTA DAI	Jl. Prawiranegara Desa Jatinegoro Kalimantan Timur	28 Januari 2024	20%			20.350.000	40.120.000	4.010.000	40.120.000	24.350.000		#ASDEI
13	03	KOPERASI SIKUNEN MINTA DAI	Jl. Prawiranegara Desa Jatinegoro Kalimantan Timur	31 Januari 2024	4%			4.952.00.000	7.041.24.975	20.012.650	20.012.650	27.984.000		#ASDEI
14	04	KOPERASI SIKUNEN MINTA DAI	Jl. Prawiranegara Desa Jatinegoro Kalimantan Timur	27 Januari 2024	10%			1.010.000.000	1.015.00.000	4.004.000	7.039.627.000	95.004.000	43.900.000	#ASDEI
15	05	KOPERASI SIKUNEN MINTA DAI	Jl. Langkawi Desa Jatinegoro Kalimantan Timur	28 Januari 2024	7%			25.200.000	49.271.000	43.000.000	70.000.000	37.000.000	81.000.000	#ASDEI

Pada saat pelaksanaan RAT, pemantauan pelaksanaan terjadi melalui Dinas Koperasi yang dapat mengirimkan perwakilannya untuk ikut serta memantau langsung pelaksanaan RAT. Agar rapat dapat terlaksana sesuai dengan tata cara dan peraturan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar (AD/ART), koperasi juga harus mematuhi Perjanjian dan Undang-undang yang mengatur ketaatan koperasi terhadap persetujuan. Implementasi perjanjian dan peraturan RAT, termasuk penyelesaian proses pemungutan suara sebanyak yang diperlukan, hasil rapat dan evaluasi hasil RAT serta analisis laporan keuangan, evaluasi laporan keuangan koperasi diakui dalam RAT. Hal ini termasuk memeriksa apakah laporan mematuhi standar akuntansi, serta menilai kinerja keuangan koperasi dan menegakkan keputusan RAT, dengan Dinas Koperasi mengawasi pelaksanaan keputusan RAT. Hal ini mencakup rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati, serta langkah-langkah yang diambil manajemen koperasi untuk menindak lanjuti hasil pertemuan. Kami yakin dengan monitoring dan evaluasi yang kuat terhadap Dinas Koperasi NTB, maka penerapan RAT di koperasi dapat lebih transparan, akuntabel dan selaras dengan tujuan koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya.

### Hambatan – hambatan dan Solusi Dinas Koperasi dan Umkm NTB Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Pada Rapat Tahunan Koperasi

Meskipun peran Koperasi dan Dinas UMKM NTB sangat penting, namun banyak Permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan dalam meningkatkan partisipasi anggota pada rapat tahunan koperasi, yaitu Kurangnya pengetahuan anggota koperasi terkait pentingnya RAT, Kurangnya anggota koperasi dalam penggunaan teknologi, kemampuan anggota dalam menyusun laporan keuangan masih kurang dan tidak bisa dalam membuat buku RAT. Manajemen koperasi atau komite RAT mungkin lemah dalam mendorong anggota untuk berpartisipasi aktif dan berpartisipasi, dan manajemen yang tidak jelas atau tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anggota, Saluran komunikasi yang tidak efisien atau tidak lengkap dapat menghalangi informasi terkait RAT menjangkau semua anggota, dan masih adanya budaya partisipasi yang lemah Di beberapa koperasi, partisipasi anggota mungkin tidak dianggap sebagai budaya organisasi, namun kebiasaan tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting dapat menimbulkan hambatan psikologis terhadap partisipasi anggota dalam RAT serta Keberagaman latar belakang, minat, dan kebutuhan anggota dapat menyulitkan untuk menemukan tempat dengan RAT yang menghubungkan semua orang. Hal

ini merupakan beberapa hambatan dinas koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota pada rapat tahunan koperasi.(Nisa1 & Hidayat, 2022)

Peran pemerintah melalui dinas koperasi dan umkm dalam menghadapi hambatan yang terjadi yaitu, Sosialisasi dan Edukasi yang dimana Dinas Koperasi dan UMKM NTB aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada anggota koperasi mengenai pentingnya RAT, memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada koperasi yang belum menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dalam rangka meningkatkan pengetahuan koperasi mengenai pelaksanaan RAT, memberikan bantuan dalam menyusun laporan keuangan dan penyusunan buku RAT, membantu anggota koperasi mengembangkan kemampuannya melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ini, Pelatihan-pelatihan tersebut mencakup tugas-tugas manajemen, keuangan dan administrasi yang dapat memperkuat kapasitas anggota dalam pelaporan pajak, memastikan bahwa imformasi mengenai RAT di sampaikan dengan cara yang efektif dan berulang-ulang melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk email,sms, dan media social, menekankan pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota, proses pengambilan keputusan, serta manfaat partisipasi aktif dalam RAT, Dengan pemahaman yang baik, anggota diharapkan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam RAT Serta melakukan musyawarah sesama anggota koperasi sebelum melaksanakan RAT terkait lokasi pelaksaaan RAT agar tidak terjadi permasalahan.

#### IV. KESIMPULAN

Artikelini menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi mitra dalam Rapat Tahunan Anggota Koperasi (RAT).Dinas Koperasi dan UMKM NTB telah berhasil memotivasi anggota koperasi melalui berbagai program dan inisiatif, seperti sosialisasi pentingnya RAT, pemberian pelatihan dan dukungan pengelolaan koperasi.

Peran koperasi NTB dan UMKM Dinas dalam meningkatkan partisipasi anggota pada RAT sangat penting.Kami percaya bahwa partisipasi anggota dalam RAT dapat ditingkatkan melalui komunikasi, pendidikan, pelatihan, fasilitasi teknis dan pemantauan yang efektif.Dengan partisipasi yang lebih besar, koperasi dapat menjadi lebih dinamis dan berkembang lebih berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya dan masyarakat sekitar.

Namun upaya ini masih menghadapi banyak tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran anggota mengenai pentingnya RAT, dan hambatan geografis yang menghalangi anggota untuk mengakses wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan strategi komunikasi, memperkuat kerja sama antara perusahaan dan koperasi, dan menggunakan teknologi informasi untuk memastikan partisipasi efektif anggota dan secara umum. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, partisipasi anggota dalam koperasi RAT di NTB diharapkan dapat meningkat secara signifikan; Hal ini akan memperkuat transparansi, transparansi dan pengambilan keputusan di koperasi serta meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi secara keseluruhan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Kami dari penyusun artikel ini mengucap terimakasi Kepada bapak Rahmad Hidayat S. AP.M. AP selaku Dosen Pembimbing Lapangan atas dukungan dan partisipasinya dan juga kami sangat berterimakasih kepada pihak pengelola jurnal ArembeN: Jurnal Pengabdian Multidisiplin, apabila ada kata kata yang kurang pas dalam artikel kami, kami minta maaf.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani, D., Hidayat, R., & Mataram, U. M. (2024). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC)* 119. 11, 146–156.
- Hidayat, R. H., Rahcman, M. T., & Burhan, M. R. (2020). Studi Komparasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2019 (Studi di Dinas Dukcapil Kota Mataram dan Dukcapil Kabupaten Lombok Barat). *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 6(2), 624–635. <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v6i2.131>
- Hidayat, R., Nazwin, A. H., Publik, A., Mataram, U. M., & Usaha, P. A. (2023). *Peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha*. 10, 233–241.
- Nisa1, L., & Hidayat, B. R. T. Y. 2 R. (2022). *The Role Of The BUMDes In The Management Of Vital Assets Of The*. 3(1), 32–43.

- ANASRULLOH, M., Rokhim, A. M., & Firotul M, A. F. (2021). Pengaruh Pendidikan Perkoperasian Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Wanita Di Kabupaten Tulungagung. *Publicio: Jurnal Ilmiah* (Fitriani et al., 2024)Politik, Kebijakan Dan Sosial, 3(1), 11–17. <https://doi.org/10.51747/publicio.v3i1.620>
- Dwipa, K. A., Luh, N., & Erni, G. (2022). Prosedur Penilaian Koperasi Berprestasi pada Koperasi Se-Kabupaten Buleleng Periode Tahun Buku 2020 Berdasarkan Hasil Laporan Rapat Anggota Tahunan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 12(3), 721. [https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/50421/24355](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/50421%0Ahttps://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/download/50421/24355)
- Jannah, M., Rasti, A., Ramadaeni, N., & Yulanda, A. R. (2022). Koperasi Syariah Dan Umkm. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 3(1), 1–11.
- Wira, V., & Gustati. (2016). Peranan Pengetahuan Dalam Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah ( KSPPS ) ( Survey Pada Anggota KSPPS Kapalo Koto dan Lambuang Bukik ). *Account Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 514–523.
- [https://diskop.ntbprov.go.id/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYCX8AJeOybLiZ8Hs3d-7mA4IP\\_s8AD7Xo64nid9Wlqopzccscd0DWAhA\\_aem\\_AWvZB1cLn6eYttVgbyOqW73zadM4zDXGs2KHmBfTTjgjC9UwjGPMQPS\\_5go8PyrEgcYZj0jjR5rCziptJKlv\\_Z8A](https://diskop.ntbprov.go.id/?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAAaYCX8AJeOybLiZ8Hs3d-7mA4IP_s8AD7Xo64nid9Wlqopzccscd0DWAhA_aem_AWvZB1cLn6eYttVgbyOqW73zadM4zDXGs2KHmBfTTjgjC9UwjGPMQPS_5go8PyrEgcYZj0jjR5rCziptJKlv_Z8A)
- <https://journal.iai-agussalimmetro.ac.id/index.php/attaaajir/article/download/420/171>